

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

**“Agama dan Perdamaian: Perspektif
Multikultural”**

PRAWACANA

Amsal Bakhtiar

**The Contribution of Master Chin Kung in
World Peace and Interfaith Dialogue**

WACANA

Gadis Arivia

Multikulturalisme: Re-imagining Agama

Ponijan Liaw

**Tragedi Manusia dan Kemanusiaan:
Merajut Perdamaian dalam Perspektif
Agama Buddha**

I Ketut N. Natih

**Agama dan Perdamaian: Perspektif
Multikultural Menurut Agama Hindu**

Albertus Patty

**Meretas Akar Konflik dan Kekerasan:
Refleksi Protestan**

BOOK REVIEW

A. Bakir Ihsan

Relasi antar Agama dalam Perspektif Fiqih

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. VII, No. 1, 2005

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Said Agil H. Al-Munawwar
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Amsal Bakhtiar
Kautsar Azhari Noer
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri

Pemimpin Redaksi

Edwin Syarip

Anggota Redaksi

Wiwi Siti Sajaroh
A. Bakir Ihsan

Sekretariat

Suzanti Ikhlās

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, 15412
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Pre-discourse

- 1-10 **The Contribution of Master Chin Kung in World Peace and Interfaith Dialogue**
Amsal Bakhtiar

Articles

- 11-20 **Multikulturalisme: Re-imagining Agama**
Gadis Arivia
- 21-30 **Tragedi Manusia dan Kemanusiaan: Merajut Perdamaian dalam Perspektif Agama Buddha**
Ponijan Liaw
- 31-46 **Agama dan Perdamaian: Perspektif Multikultural Menurut Agama Hindu**
I Ketut N. Natih
- 47-58 **Meretas Akar Konflik dan Kekerasan: Refleksi Protestan**
Albertus Patty
- 59-72 **Beragama yang Fanatik Tanpa Sikap Ekstrem**
Amsal Bakhtiar
- 73-86 **Manajemen Konflik Negara terhadap Masyarakat Multikultural: Kasus Komunitas Muslim Australia**
M. Amin Nurdin

Book Review

- 87-94 **Relasi antar Agama dalam Perspektif Fiqih**
A. Bakir Ihsan

Document

- 95-112 **Upacara Slametan Gua Sam Poo Kong di Semarang dalam Perspektif Multikultural**
M. Ikhsan Tanggok
- 113-126 **Merangkai Perbedaan, Merayakan Perdamaian: Telaah Konflik antara Pribumi dan Etnis Cina**
Ulfah Fajarini

AGAMA DAN PERDAMAIAN: PERSPEKTIF MULTIKULTURAL

Fenomena kekerasan atas nama kepentingan kelompok, ideologi, bahkan atas nama agama masih juga tak lekang. Kekerasan yang dioperasikan baik melalui negara maupun melalui komunitas tertentu telah menghapus misi mulia kemanusiaan yang disuarakan oleh agama-agama. Ironisme agama dijadikan tameng untuk mengeruhkan suasana konflik yang terjadi. Kalau demikian, masih adakah harapan perdamaian yang dapat dipertaruhkan dari agama?

Semua agama hadir menawarkan perdamaian atau paling tidak dapat menjadi alternatif bagi sistem yang dianggapnya merugikan kehidupan sosial. Ajaran agung yang diwartakan agama telah menyesaki setiap masjid, gereja, sinagog, pure, vihara, klenteng, dan tempat persembahyangan lainnya. Masing-masing kitab suci telah diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa manusia. Agama hanyalah sebuah norma, aturan main, dan tatalaksana yang membutuhkan media, baik lembaga maupun perorangan. Begitu pun pengejawantahan misi perdamaian dalam agama, membutuhkan “tubuh” untuk membumikan dan menggerakkannya.

Inilah yang dilakukan oleh Master Chin Kung untuk membumikan ajaran langit perdamaian bagi kepentingan manusia di bumi. Atas komitmen dan perjuangan menegakkan perdamaian dunia yang digagas dan dipraktikkannya, Chin Kung bukan lagi sekadar sebuah nama, tapi telah menjadi ikon perdamaian yang lahir dari semangat keagamaan untuk kepentingan semua umat manusia. Universalitas perdamaian ditunjukkan oleh Chin Kung dengan memberikan bantuan kepada berbagai pihak bagi pengembangan sumber daya intelektual yang diharapkan menjadi benih bagi pewarisan nilai-nilai perdamaian. Ajaran mulia agama dijadikan Spirit untuk membantu orang-orang yang menghasrati dan berkomitmen bagi perdamaian tanpa terjebak pada sekat-sekat agama atau ideologi lainnya. Inilah yang ditelaah oleh Amsal Bakhtiar dalam tulisannya berjudul, *The Contribution of Master Chin Kung in World Peace and Interfaith Dialogue*.

Atas semangat dan komitmen untuk menebarkan perdamaian, maka jurnal **Refleksi** kali ini menurunkan tema besar “Agama dan Perdamaian:

Perspektif Multikultural.” Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewariskan sisi filosofis dan genealogis serta kemungkinan-kemungkinan perwujudan perdamaian di bumi manusia yang pluralistis baik dari segi budaya, suku, bahasa, dan agama. Lebih dari itu, jurnal ini mencoba melihat sejauh mana peran agama-agama, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, maupun Konghucu, dalam proses penciptaan perdamaian di tengah realitas yang multikultural. Agama yang dalam dirinya terkandung kebenaran mutlak harus berhadapan dengan kebenaran-kebenaran yang lain yang memiliki hak yang sama untuk eksis dan berinteraksi demi kedamaian di bumi. Dalam konteks ini Gadis Arivia mencoba merekonstruksi agama dalam perspektif multikulturalisme dengan meletakkan agama sebagai bentukan budaya. Menurutnya untuk memahami agama sebagai pijakan multikulturalisme harus diawali “oleh kesepahaman bahwa agama merupakan suatu realitas yang hadir dari berbagai teks yang berupaya menciptakan makna-makna dan imajinasi baru. Dengan demikian, komunalisme, yang menjadi pijakan bagi rekognisi identitas, harus dilebur demi mencairnya multikulturalisme dalam masyarakat. Perlu adanya rekognisi pluralitas atau politik perbedaan untuk menciptakan sebuah tata kehidupan yang saling menghargai dan bermartabat.

Terjadinya tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh beragam kepentingan, termasuk atas nama agama, lebih disebabkan oleh tidak adanya sinergi antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri. Ponijan Liaw melihat kunci persoalan yang harus diselesaikan demi tegaknya “damai di bumi” adalah dengan meretas aral yang mendistorsi ketiga pola hubungan tersebut. Dengan kata lain, krisis kemanusiaan yang lahir baik atas nama politik, kepentingan kelompok, maupun atas nama agama tidak akan pernah usai ketika manusia tidak mampu mencairkan pola hubungan yang harmonis antara dirinya dengan alam, manusia sekitar, dan pada dirinya sendiri, sehingga penghargaan agama terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak sekadar ajaran yang diagungkan, namun juga dirasakan.

Nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam agama dapat dilihat dari perincian ajaran yang ada di masing-masing agama. Dalam Hindu, menurut I Ketut N. Natih ada ajaran yang disebut dengan *universalisme*, *tattvam asi*, *ahimsa*, *svadhes*, *moksa artham jagat hita ya ca iti dharma* dan sebagainya. Ajaran ini sekaligus mengajarkan tentang pentingnya penghargaan yang sebesar-besarnya atas fenomena multikulturalisme dalam

masyarakat. Universalisme dalam Hindu, menurutnya, merefleksikan paham bahwa semua agama itu sama dan benar. Tidak ada satu pun agama yang paling baik dan paling benar. Semua agama sama, tidak ada satu pun yang lebih tinggi, lebih mulia dan lebih luhur.

Perdamaian tidak identik dengan kesamaan dan kesatuan, namun lebih pada adanya hak pada setiap orang untuk menikmati kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan dengan sesama. Menurut Albertus Patten senjakala perdamaian yang sekaligus menjadi akar konflik di antara umat berbagai agama disebabkan oleh banyak faktor. Namun secara garis besar dipilah dalam dua kategori, yaitu persoalan teologis dan non-teologis. Dari kedua sumber tersebut, yang utama adalah ketidaksiapan umat beragama untuk hidup dalam masyarakat dan dunia yang multikultural. Menurutnya, ketika rasionalitas gagal mewujudkan visinya dalam membangun peradaban manusia yang penuh damai, agama kembali ditantang untuk membuktikan peran profetiknya untuk menciptakan perdamaian di dunia ini. Itulah sebabnya dialog menjadi penting untuk membangun perdamaian itu. Dialog tersebut harus diletakkan dalam kerangka soteriologi, yaitu keselamatan, keselamatan manusia yang berisi kebebasan, keadilan, kesetaraan, perdamaian, dan keselamatan bumi dan planet ini.

Ikatan umat beragama dengan ajaran agamanya sering dianggap sebagai bagian dari proses terjadinya sekat-sekat sosial yang sekaligus dianggap sebagai duri bagi multikulturalisme. Menurut Amsal Bakhtiar dalam beragama setidaknya ada variabel yang harus dipahami dan disikapi secara proporsional, yaitu 'fanatik' dan 'ekstrem'. Kedua istilah ini memiliki implikasi yang berbeda dalam sikap keberagamaan. Fanatik yang dimaksud adalah sikap beragama yang saleh dan taat dalam menjalankan ibadah, yang termanifestasi dalam kehidupan individu maupun sosial. Adapun ekstrem adalah sikap beragama yang lebih literal, cenderung ideologis, dan eksklusif. Sikap eksklusif ini pada akhirnya dapat menjurus pada semangat komunalisme agama dan ideologisasi agama, sehingga yang muncul ke permukaan bukan agama yang sebenarnya, tetapi agama yang sudah terbungkus oleh berbagai kepentingan distorsif, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Konflik sesungguhnya bisa ditata menjadi energi yang positif bagi masyarakat yang multikultural. M. Amin Nurdin mengangkat kasus (negara) Australia dalam memanager konflik yang terjadi dalam masyarakatnya. Realitas sosial penduduk Australia yang beragam kultur, etnis, dan

agama sebagai implikasi terbukanya kebijakan imigrasi di tahun 1960-an telah mendorong pemerintah Australia untuk melakukan rekayasa sosial politik dengan menjadikan multikulturalisme sebagai ideologi negara. Kebijakan ini bertujuan untuk meredusir konflik nilai dan norma yang saling bertentangan antara masyarakat, kulit putih di satu pihak dan para pendatang di pihak lain. Implikasi multikulturalisme, tampak pada perkembangan komunitas muslim Australia -dan komunitas etnis dan agama lainnya—yang dilindungi warisan kultural mereka sehingga tetap *survive* hingga hari ini, meski tetap dicurigai memiliki potensi konflik.

Energi agama dalam merayakan multikulturalisme dapat dilihat pula dalam upacara slametan Gua Sam Poo Kong di Semarang yang dilakukan oleh orang-orang Cina atau Tionghoa yang menganut agama di luar Islam di Jawa. Menurut M. Ikhsan Tanggok upacara *slametan* dalam rangka membangun kembali gua Sam Poo Kong di klenteng Sam Poo Kong di Semarang, tidak sekadar upacara suci, tapi juga sebagai wadah menemukan dan mempersatukan dua kelompok suku bangsa yang berbeda secara kultur untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat.

Mengharapkan peran agama dalam mewujudkan perdamaian mengharuskan adanya kesepahaman pemeluknya terhadap ajaran agamanya, dan kesepahaman antar umat beragama itu sendiri. Dalam *Book Review*, A. Bakir Ihsan melihat adanya korelasi antara pemahaman keagamaan seseorang dengan sikapnya terhadap agama lain. Pemahaman yang eksklusif terhadap agama telah memicu lahirnya egosentrisme keberagamaan yang menganggap agama lain sebagai yang salah. Sikap ini terutama dipicu oleh orientasi *fiqhiyyah* yang cenderung hitam putih dan menafikan kebenaran yang lain. Orientasi *fiqhiyyah* yang bias inilah yang perlu direkonstruksi sehingga pemahaman sepihak dan eksklusif terhadap agama bisa mencair yang pada akhirnya akan meretas kebekuan interaksi antar umat beragama yang selama ini sering menjadi benih tragedi kemanusiaan yang tidak perlu. Dan inilah tema besar yang hendak diusung oleh jurnal ini bagi kepentingan perdamaian di muka bumi yang kita pijak bersama. Semoga!

Jakarta, April 2005

Redaksi

MANAJEMEN KONFLIK NEGARA TERHADAP MASYARAKAT MULTIKULTURAL: KASUS KOMUNITAS MUSLIM AUSTRALIA

M. Amin Nurdin

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

amin.nurdin@uinjkt.ac.id

Abstract: *The diverse cultural, ethnic, and religious social reality of the Australian population, as a consequence of the open immigration policy in the 1960s, has prompted the Australian government to engage in social and political engineering by adopting multiculturalism as a state ideology. This policy aims to mitigate conflicting values and norms among the white population on one side and immigrants on the other. Australia seems to have successfully managed various conflicts, indicated by the low potential for political, ethnic, and religious violence, including terrorism, compared to other countries, especially its neighbors. The implications of multiculturalism are also evident in the development of the Australian Muslim community, as well as other ethnic and religious communities, which have preserved their cultural heritage and continue to thrive today, albeit still suspected of having potential conflicts.*

Keywords: *Religious; Political; Ethnic Conflict; Multiculturalism; Australian Muslims.*

Abstrak: Realitas sosial penduduk Australia yang beragam kultur, etnis, dan agama sebagai implikasi terbukanya kebijakan imigrasi di tahun 1960-an telah mendorong pemerintah Australia untuk melakukan rekayasa sosial politik (*social engineering*) dengan menjadikan multikulturalisme sebagai ideologi negara. Kebijakan ini bertujuan untuk meredusir konflik nilai dan norma yang saling bertentangan antara masyarakat: kulit putih di satu pihak dan para pendatang di pihak lain. Australia tampaknya berhasil mengelola berbagai konflik yang diindikasikan dengan rendahnya beragam potensi kekerasan politik, etnik, dan keagamaan, termasuk terorisme, bila dibandingkan dengan negara lain, khususnya negara-negara tetangganya. Implikasi multikulturalisme, tampak pula pada perkembangan komunitas muslim Australia—dan komunitas etnis dan agama lainnya—yang dilindungi warisan kultural mereka sehingga tetap survive hingga hari ini, meski tetap dicurigai memiliki potensi konflik.

Kata Kunci: Konflik Agama; Politik; Etnis; Multikultural; Muslim Australia.

Pendahuluan

Kebanyakan masyarakat kontemporer bersifat multikultural. Istilah ini menjadi *fashionable* dan secara luas diterima sebagai konsep sosial yang ideal dalam ideologi negara. Di negara-negara Barat, seperti Eropa Barat, Amerika Serikat dan termasuk Australia, *multikulturalisme* dianggap sebagai sebuah *taken for granted* bagi 'Dunia Baru' menggantikan 'Dunia Lama' yang bersifat konservatif, rasis, dan fasis.¹ Akibatnya, pandangan dunia terhadap nilai-nilai dan hegemoni juga ikut berbeda. Ideologi ini semakin berkembang dan dilaksanakan di beberapa negara, meski berbeda dalam teknik penerapannya.

Multikulturalisme merupakan sebuah sejarah baru sebagai jawaban atas mengalirnya para imigran mancanegara, khususnya negara-negara Asia dan Timur Tengah, yang datang ke negara-negara Barat setelah pecahnya Perang Dunia II dan memuncak pada tahun 1960-an, yang berakibat kepada perubahan komposisi demografis baik secara etnik, sosial dan budaya. Pada gilirannya, hal ini telah memunculkan sejumlah *problem migrants* tentang adanya perbedaan budaya mereka dengan prinsip nilai-nilai budaya demokrasi liberal.² Ada dua persoalan yang dihadapi negara-negara demokrasi liberal terhadap hal ini, pertama, secara internal bagaimana menjaga integrasi sosial para imigran agar dapat menyesuaikan diri dengan budaya dominan dan pandangan hidup di tempat mereka yang baru. Kedua, secara eksternal bagaimana memelihara kopor budaya (*cultural*

baggage) dan identitas kelompok migran yang telah mereka bawa dari kampung halaman masing-masing.³

Respons negara-negara demokrasi liberal dalam mengelola realitas keragaman etnik-budaya penduduknya yang menjadi kelompok minoritas dalam konteks integrasi sosial melalui dua macam kebijakan ideologis, yaitu ideologi *assimilasi* dan *multikultural*.⁴ Ideologi *assimilasi* dibangun atas asumsi bahwa kaum migran akan bisa melepaskan cara hidup lama mereka dengan cara menyesuaikan diri dalam kerangka budaya dan gaya hidup Barat (*Western conformism*). Dalam pembauran tersebut, nilai-nilai hegemoni menjadi rujukan utama, sedangkan komponen etnis minoritas hanya mengisi bagian sisa yang sebenarnya tidak dikehendaki. Dalam situasi seperti ini, makanan etnik pun dicurigai, bahasa asal etnik dianggap kurang intelektual dan tidak menguntungkan baik secara sosial maupun politik. Ideologi ini sangat rasis dan diskriminatif terhadap segala akses sosial dan negara serta menjadi lahan subur tumbuhnya etnosentrisme, yang hanya meyakini validitas suatu sistem budaya.

Kritik terhadap ideologi *assimilasi* sekitar tahun 1960-an dan lahirnya ideologi *multikulturalisme* telah mengundang wacana akademisi dan publik tentang apa bentuk model masa depan ideologi negara. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa *multikulturalisme* dan etnisitas merupakan suatu ancaman bagi bangsa dan *way of life* Barat. Pendapat sebaliknya mengatakan, ideologi *multikulturalisme* dan etnisitas mampu memecahkan masalah hak-hak sosial, politik, dan ekonomi kelompok minoritas. Pendapat ini didukung oleh pendapat lain yang menyebutkan bahwa kekuatan identitas nasional bangsa yang bersifat rasis akan menjadi rapuh dengan berkembangnya *multikulturalisme*.⁵

Ideologi *multikulturalisme* kemudian menjadi sebuah gerakan yang mendorong terwujudnya perlindungan identitas budaya kelompok minoritas. Sejumlah faktor yang menyebabkan perubahan ideologis ini, antara lain; (a). fluktuasi komposisi populasi kaum migran yang besar, (b). percepatan migrasi yang mengakibatkan membengkaknya arus imigran, dan (c). munculnya perubahan pandangan di pihak masyarakat kulit putih tentang kesetaraan dan keadilan bagi kelompok minoritas.⁶

Pandangan serupa juga terjadi di Australia. Australia adalah juga sebuah negara imigran dan demokrasi liberal yang berada di Asia dan bertetangga dengan negara Indonesia. Semua agama yang ada di Australia, kecuali agama asli kelompok suku Aborigin, masuk melalui para migran dari

mancanegara sekaligus membawa sistem kepercayaan dan praktik keagamaan mereka, yang ditransformasikan oleh missonari, pendeta, ulama, biksu, dan media publikasi. Dengan demikian, bentuk profil agama di Australia sangat terkait dengan sejarah migrasi bangsa atau masyarakat Australia itu sendiri.

Bangsa Australia sampai tahun 1960-an masih melihat bahwa negara Australia merupakan suatu negara Kristen. Namun sejak era Perdana Menteri Whitlam, persepsi ini berubah tidak lagi menjadi yang hanya berdasarkan satu agama, melainkan sebuah negara berlatar belakang multi-kultural. Karena itu negara ini memiliki pluralitas keagamaan pula.

Penduduk Australia yang penuh sesak dan hiruk pikuk dengan berbagai latar belakang nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi acuan budaya, dilihat secara sosiologis, merupakan lahan basah aneka konflik dan kekerasan sebagai akibat heterogenitas sosial budaya, etnis, dan agama. Namun, inilah keunikan negara Australia. Negara ini terkenal dengan 'kesunyian' dari berbagai ragam konflik, apalagi konflik berbau keagamaan, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, khususnya Indonesia, termasuk benua Amerika dan Eropa.

Di sinilah letak pertanyaannya. Mengapa negara yang dihuni begitu banyak multi-etnis mampu meredam ketegangan-ketegangan dan kekerasan-kekerasan dalam bentuk konflik budaya dan terorisme serta radikalisme? Negara ini tetap tegak dan terhormat meretas kesatuan sosial (*social integration*) dan kerekatan sosial (*social cohesiveness*), seakan memberi contoh teladan dan mematahkan teori konflik, beginilah sebuah bangunan negara bangsa didirikan.

Sebegitu mudahkah membangun sebuah proses persatuan dan kohesi sosial negara Australia, bila dianggap negara ini sebagai *success story* negara modern. Tentu tidak dan bahkan mengalami suatu pengalaman panjang yang berliku oleh penolakan. *Pertama*, penolakan masyarakat kulit putih yang dominan enggan berbaur dan berbagi rasa dengan para migran, kelompok minoritas dan berkulit berwarna, yang datang membawa budaya mereka yang marginal dan bertentangan. *Kedua*, masyarakat kulit putih khawatir akan kehilangan kebanggaan identitas ras dan budaya superior yang berasal dari *Anglo-Celtic* dan disertai nasionalisme mereka yang obsesif.

Sejak tahun 1973, *Multikulturalisme* telah menjadi ideologi negara dan memulai babak baru sejarah Australia dalam menapak jalan kenegaraan

dan kebangsaan di masa berikutnya. Sebuah usaha domestifikasi komunitas-komunitas sosial etnik yang bertaburan dan fluktuatif serta rawan konflik. Babak baru dimulai setelah berbagai usaha dilakukan negara sebelumnya di dalam menerima kehadiran para pendatang.

Kebijakan ini adalah suatu usaha rekayasa sosial politik (*social engineering*) dan manajemen konflik dalam kerangka meredam ketegangan dan kekerasan dalam bentuk konflik budaya, terorisme, dan radikalisme. Dalam realitas sosial ini, terlihat kecilnya kemungkinan konflik etnis sosial, budaya, dan agama yang selama ini terjadi di Australia.⁷

Munculnya gagasan *multikulturalisme* Australia melalui perdebatan dan pergulatan yang panjang serta didukung oleh berbagai kalangan akademikus, aliran ideologi, dan pemimpin-pemimpin komunitas etnis, pada tahun 1970-an Perdana Menteri Gough Whitlam yang berasal dari partai Buruh, mengambil kebijakan *Multikulturalisme*. Kebijakan ini berdasarkan realitas penduduk Australia yang beragam kultural dan etnis sebagai implikasi membeludaknya kebijakan migrasi besar-besaran. Karenanya, diperlukan sebuah bentuk identitas nasional yang memainkan peranan sebagai penjaga gawang agar terhindarnya masyarakat Australia dari berbagai konflik dan kekerasan di masa mendatang. Pada fase pertama penerapan *Multikulturalisme* masih terbatas pada komitmen pemerintah untuk menjamin hak-hak para pendatang di dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah yang menyangkut persoalan ekonomi, budaya, pemukiman, dan pekerjaan. Pemerintah tidak hanya menjamin hak-hak mereka, tetapi juga berkeinginan untuk memelihara etnis sosial dan agama mereka sebagai pengayaan (*enrichment*) dan penguatan identitas nasional Australia. Identitas budaya migran —dari mana pun— diperbolehkan duduk bersanding dengan *mainstream* budaya Australia, termasuk cara berpakaian, seperti hijab sekalipun. (Bandingkan dengan negara Perancis yang tidak memperbolehkan penggunaan simbol-simbol keagamaan). Dan penggunaan bahasa yang *multi-lingual*. (Bandingkan dengan *multikulturalisme* Kanada, yang menjadi acuan Australia, hanya menerapkan *Dwi-lingual*, Perancis dan Inggris).

Fase kedua *Multikulturalisme* di masa Perdana Menteri Malcom Fraser, dari partai Liberal, berlanjut dan semakin mendapat landasan kuat di tengah masyarakat Australia dengan diwujudkannya aspek kesetaraan sosial (*social equity*) bagi seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang sosio-

kultural, etnik dan agama (*all for Australians*), terutama pemberian akses-akses sosial ekonomi, hukum, dan lain sebagainya, yang memupus adanya jarak sosial (*social distance*) dan diskriminasi. Masa-masa selanjutnya ditandai lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan yang membumikan ideologi *Multikulturalisme* tersebut. Intinya kebijakan pemeliharaan warisan budaya para pendatang merupakan suatu keniscayaan. Suatu pergerakan dari *monokulturalisme* menuju *multikulturalisme* sedang menggelinding dan berproses.⁸

Namun persoalan integrasi dan kohesi sosial masyarakat Australia dalam kenyataan tidaklah semudah yang dibayangkan. Persoalannya terletak bagaimana interaksi sosial masyarakat Islam dengan hegemoni budaya penduduk kulit putih yang tampak bertolak belakang. Masyarakat muslim Australia bisa dijadikan representasi hubungan sosial dengan masyarakat Australia pada umumnya, karena mereka bukan saja menempati posisi kedua jumlah penganut agama (1,2% = k. 1.400.000 orang) —meski ada posisi kedua yang menyatakan tidak beragama (21,8%)— setelah agama Kristen yang menjadi penganut mayoritas, tetapi mereka juga dianggap sebagai komunitas yang sulit menyesuaikan diri sehingga dicap sebagai salah satu biang keladi potensial konflik sosial masyarakat Australia.

Latar belakang sejarah keberadaan umat Islam di Australia telah berumur panjang. Bahkan sebelum kaum kulit putih menduduki daratan Australia di tahun 1778, para nelayan Makassar telah lalu lalang di daerah pantai Darwin untuk mencari terepang yang kemudian dijual untuk pasar daratan Tiongkok dan sempat menikahi kaum wanita penduduk asli Australia, Aborigin, sambil mengenalkan agama Islam. Gelombang pertama kedatangan kelompok muslim di tanah Australia sekaligus kelompok paling awal yang datang dibanding dari etnik lainnya dimulai dari kelompok muslim Afghanistan yang berlangsung sejak tahun 1860 hingga 1910. Ceritanya dimulai ketika sekelompok pengusaha pertambangan memerlukan binatang onta sebagai alat transportasi dan eksplorasi ke daerah pedalaman. Maka didatangkanlah 34 penunggang onta berkebangsaan Afghanistan yang beragama Islam dan kemudian membentuk komunitas yang kuat di daerah pinggiran kota-kota pedalaman. Meski mereka tidak menetap dalam jangka yang panjang, namun mereka menjadi sumber inspirasi bagi lainnya yang sedang kesulitan ekonomi tentang kawasan Australia yang luas dan kaya untuk datang mengadu nasib ke Australia. Ada sekitar 3.000 sampai 4.000 orang masuk ke Australia. Mereka kebanyakan

bekerja sebagai pedagang keliling yang memasok barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ini adalah awal kedatangan kaum muslim ke Australia dan telah menjadi sejarah dan cerita rakyat Australia.⁹

Fase berikutnya merupakan masa kemunduran bagi umat Islam ketika pemerintah federasi yang baru saja dibentuk memaklumkan *Kebijakan Kulit Putih* yang berbau rasis dan diskriminatif di tahun 1901. Kebijakan ini menetapkan penolakan kepada penduduk non-Eropa untuk mengajukan hak-hak permohonan naturalisasi untuk menjadi penduduk menetap. Hal ini berakibat kepada sulitnya kesempatan untuk mencari pekerjaan sehingga mereka menjadi kelompok marginal. Akhirnya, sebagian besar dari mereka kembali ke kampung halamannya, sedangkan sebagian kecil lainnya tetap menetap di Australia. Kelompok yang tersisa ini lebih kurang 3.000 orang sampai tahun 1921 dan dasingkan oleh masyarakat *Anglo-Celtic Putih* secara keagamaan dan ras sehingga banyak dari mereka kehilangan keyakinan keislaman. Kebijakan kulit Putih tahun 1901 menandai berakhirnya kedatangan kaum muslim yang masuk ke Australia.

Fase berikutnya merupakan masa bulan madu bagi kaum muslim. Hal ini diawali dengan persoalan internal dan eksternal masyarakat Australia itu sendiri yang terjadi sebelum dan setelah perang Dunia II. Secara internal, pertumbuhan jumlah populasi Australia sangatlah lambat (9 juta jiwa), sedangkan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan cukup signifikan sehingga memerlukan tenaga kerja baru yang harus diimpor dari luar negeri. Secara eksternal, Australia menghadapi sikap permusuhan dari invasi tentara Jepang ke Asia Tenggara yang telah menduduki Papua Nugini dan sempat membombardir pertahanan Australia di Darwin serta munculnya negara-negara baru kawasan Asia, yang sebagian merupakan tetangganya, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Pakistan, dan India. Kedua situasi yang tak menguntungkan ini, pemerintah Australia segera mempercepat pertambahan populasi dalam kerangka pertahanan nasional jangka panjang dengan cara memperlunak seleksi kriteria imigrasi kedatangan para migran dan *refugee*, sekaligus dapat memperkuat proses industrialisasi yang sedang berlangsung.

Hingga pertengahan 1950-an, kedatangan etnis muslim masih sedikit, namun mereka memiliki pendidikan yang tinggi dan profesional. Baru pada tahun 1960-an, penduduk muslim berdatangan dengan jumlah yang

sangat besar (k.l. 10.000 jiwa), khususnya dari Turki, dengan adanya perjanjian antara pemerintah Australia dan Turki. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1970-an dengan kedatangan etnis yang mayoritas muslim dari Lebanon yang jumlahnya ratusan ribu orang sebagai pengungsi (*refugees*) sebagai akibat perang saudara di daerah asalnya, disusul lagi dari Palestina. Kedatangan kaum muslim berikutnya terjadi setiap tahun dari berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, India, dan Banglades. Adanya kenaikan jumlah penduduk Australia sampai tahun 1998, telah mengakibatkan jumlah penduduk Australia bertambah dua kali lipat dibanding setelah Perang Dunia II (tahun 1947).¹⁰

Fase terakhir ini bisa disebut sebagai pembentukan basis komunitas muslim di tengah masyarakat Australia, khususnya sejak tahun 1960-an sampai 1970-an. Secara umum masyarakat Islam Australia adalah masyarakat perkotaan (*urban*), seperti terlihat dalam sensus Australia (1996), mayoritas muslim (50%) menetap di Sydney dan Melbourne (32%) serta sebagian kecil lainnya tersebar di kota-kota utama lainnya. Basis komunitas muslim dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama, kelompok yang berbasiskan pada etnisitas. Pada umumnya etnis Turki merupakan jumlah terbanyak yang bertempat tinggal di Sydney, diikuti etnis Lebanon, dan Banglades. Etnis Indonesia juga termasuk yang paling banyak mendiami kota ini. Begitu pula, di negara bagian Victoria, banyak didiami etnis Turki dan Albania. Dan pada umumnya mereka menganut paham Sunni dan Syiah, sebagian kecil aliran Ismailiah, dan Ahmadiyah baik Lahore maupun Qadyan. Kedua, berbasiskan pada lokalitas (tempat tinggal). Banyak masyarakat muslim yang menempati suatu tempat sehingga cukup untuk membentuk suatu komunitas, seperti daerah Preston di Melbourne dan daerah Lakemba di Sydney.

Sayangnya kesatuan komunitas muslim yang sudah terbentuk belum berfungsi menyatukan berbagai komunitas etnis Islam, namun terfragmentasi dalam berbagai etnis. Faktor kesetiaan etnis masih tetap dipelihara sehingga interaksi sosial di antara mereka sangat terbatas. Etnis Turki, Lebanon, dan Albania sangat menonjol bagaikan sebuah festival lanskap Islam Australia, yang masih berjalan sendiri-sendiri. Mungkin dapat dimengerti, fragmentasi etnis muslim ini merupakan sebuah konsekuensi yang tidak dapat terelakkan bagi psikologi masyarakat yang menempati 'rumah baru' yang masih asing.¹¹

Fungsi mesjid yang ada di lingkungan maupun di kota yang mereka tempati merupakan faktor integrasi antar berbagai etnis. Setidaknya faktor ini dapat mereduksi kesetiaan etnis yang berlebihan, Mesjid memiliki peran sentral dalam kehidupan komunitas muslim baik secara keagamaan (ibadat) maupun sosial. Mesjid menjadi pusat ibadat dan tempat ekspresi, interpretasi, dan perayaan upacara-upacara keagamaan. Dengan demikian, ia juga menjadi rujukan komunitas dan alat identifikasi diri. Hampir semua aktivitas keagamaan dan sosial umat Islam Australia dikendalikan dari rumah Tuhan ini. Kemajuan Islam di Australia sebangun dan identik dengan mudahnya diketemukan berpuluh-puluh mesjid yang didirikan di berbagai kota, khususnya di New South Wales dan Victoria (80 mesjid). Dukungan pemerintah terhadap pendirian mesjid sangat kondusif. Hal ini dapat dilihat ketika peresmian mesjid terbesar di Preston, Victoria, disaksikan oleh wakil pribadi Perdana Menteri Malcolm Fraser dan *Archbishop* Roma Katolik Roma Melbourne. (Meski izin pembangunan mesjid bukanlah suatu hal yang mudah).

Dari mesjid pula, muncul kepemimpinan etnis dan Islam bermunculan. Mereka terdiri dari dominasi para imam yang dikirim langsung oleh negara etnis yang bersangkutan, seperti Turki, Mesir, dan Albania dan sebagian kecil sarjana Islam, tamatan universitas Timur Tengah. Kebijakan *multikulturalisme* telah memudahkan para imam untuk memperoleh visa kedatangan guna mendukung pelayanan keagamaan. Kepemimpinan agama sangat signifikan memainkan peranan dalam memelihara rasa identitas keagamaan. Namun model kepemimpinan yang diimpor sering-kali menemui banyak hambatan saat mereka sendiri masih asing dengan suasana baru arus budaya Australia dan sebagian imam yang masih tetap '*ethnic oriented*'. Akibatnya tema-tema aktual kajian keislaman tidak terakomodasi secara baik dan kurang mencerahkan dengan nuansa kaum muslim Australia.¹²

Upaya memayungi berbagai etnis muslim telah pula melahirkan berbagai organisasi, mulai dari tingkat negara bagian sampai negara federal. Pada tingkat federal ada Dewan Federasi Islam Australia (*The Australian Federation of Islamic Councils/AFIC*) dan tingkat negara bagian, yang berfungsi sebagai representasi komunitas muslim di tingkat pemerintahan, seperti *The Islamic Council of Victoria*. AFIC merupakan organisasi yang mewakili suara komunitas muslim di tingkat negara federal, di samping berfungsi mendanai dan memfasilitasi segala kebutuhan

umat Islam Australia. Organisasi ini dibiayai oleh dukungan masyarakat lokal, negara-negara muslim penghasil minyak, dan hasil dari penerbitan sertifikat *halal*. Di luar organisasi ini, ditemui juga organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penguasaan bahasa Inggris, solidaritas, kesetaraan gender, dan kebudayaan. *The Canberra Islamic Centre* merupakan organisasi yang cukup mencolok berdiri di tahun 1993 dan diresmikan oleh Gubernur Jenderal di tahun 1997. Pendirian organisasi ini melambangkan budaya Islam dan gaya hidup muslim yang menyediakan fasilitas sosial budaya dan menjadi penghubung antara pemerintah Australia dan Kedutaan-Kedutaan Islam di Canberra atas nama kaum muslim. Di samping itu banyak lagi diselenggarakan pemberian pelajaran agama mingguan dan kajian keagamaan berkala yang dilaksanakan baik perorangan/kelompok dan organisasi kemahasiswaan yang sedang menuntut ilmu di Australia. Suasana kehidupan keagamaan yang begitu hidup kadang-kala dirasakan seakan-akan mereka tidak berada di negara sekuler Australia yang mayoritas beragama Kristen. Kegiatan keagamaan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sesudah peristiwa 11 September 2001 dan Kasus Bom Bali di tahun 2003.¹³

Salah satu jasa AFIC adalah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan modern Islam dari tingkat dasar sampai menengah di tahun 1980-an, yang dibiayai oleh Saudi Arabia. Antara lain, *The King Khalid Islamic College* di Melbourne dan *The Malik Fahd Islamic School* di Sydney, dan *Islamic College* di Perth. Kurikulum yang diajarkan tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga pelajaran umum. Alumni-alumni sekolah ini diakui bermutu dengan diterimanya mereka di pendidikan tinggi Australia. Kelanjutan finansial sekolah-sekolah Islam ini dan sekolah Islam lainnya didukung dan disubsidi oleh pemerintah Australia dari pungutan pembayar pajak Australia. Bandingkan dengan negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris yang tidak memiliki sistem sekolah Islam yang didanai oleh negara.

Pentingnya lembaga-lembaga pendidikan modern Islam sangat mendukung kelanjutan proses pendidikan *generasi kedua* dan *ketiga* warga muslim yang datang dan lahir di Australia. Karena latar belakang mereka yang datang dari negara berkembang dan sedang diamuk perang saudara, maka sebagian besar dari mereka berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian. Hanya sebagian kecil yang memiliki kualifikasi pendidikan

akademi/ tinggi dan keahlian sehingga mau tidak mau mereka termajinalkan dalam berbagai akses yang dituntut dalam struktur sosial masyarakat Australia yang sudah mapan.

Konsekuensi imigrasi bagi masyarakat Australia dan kaum pendatang muslim (dan migran pada umumnya) terletak di luar batas demografis semata, tetapi juga berkaitan dengan dimensi-dimensi sosial, budaya, agama, politik, dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat bagaimana respons masyarakat Australia terhadap kaum muslim dan sebaliknya, bagaimana respons kaum muslim itu sendiri untuk beradaptasi dan berintegrasi di dalam rumah mereka yang baru. Respons masyarakat Australia tercitrakan dalam pemberian *stereotype* terhadap masyarakat muslim sebagai sekte minoritas dengan segala konotasi yang menggambarkan ketiadaan sejarah atau peradaban dan kelompok potensial menjadi anggota komplotan *conspiracy international* yang berbahaya. Sebagian '*image*' memang disadari atau tidak terbentuk oleh dominasi media yang memihak dan peristiwa-peristiwa politik dan berdarah internasional lainnya yang dikait-kaitkan langsung dengan umat Islam Australia. Akibatnya, mereka menuai prasangka dan tindakan diskriminatif dalam bentuk penolakan dan isolasi, dan kebencian.

Respons kelompok muslim yang berinteraksi dengan masyarakat Australia mengalami '*kegagapan*' ketika sederet kekayaan budaya dan pluralisme latar belakang mereka berbeda dengan lingkungan mereka yang baru. Banyak dari mereka merasa tercerabut dan mengalami trauma saat menemukan diri mereka sebagai sebuah minoritas agama dan dipaksa untuk mengadopsi berbagai budaya yang berbeda. Keterkejutan budaya (*culture shock*), kebingungan, dan disorientasi merupakan respons yang sering terjadi dan bisa dipahami dapat menghambat proses *adaptasi* dan *pembauran* di tengah masyarakat Australia. Hal ini terlihat orientasi kontak sosial cenderung kepada etnik dengan segala pernik-pernik budayanya.

Meski secara laten respons sebagian masyarakat Australia terhadap kaum muslim masih '*minor*', namun dukungan ideologi *Multikulturalisme* dan sebagian besar masyarakat Australia menampakkan sepenggal cahaya dan optimisme terhadap masa depan Islam Australia untuk dapat beradaptasi dan kemudian berintegrasi dengan masyarakat dan negara Australia. Pemerintah Australia memiliki komitmen untuk menciptakan '*sense of belonging*' dan penciptaan pengertian agama secara timbal balik. Antara lain pendirian *the World Conference on Religion and Peace* (WCRP), yang

merintis peran pendorong dan dukungan terhadap kelompok imigran baru dengan berbagai dialog dan pertemuan lintas agama.

Pada dasarnya *multikulturalisme* adalah semacam bentuk pelayanan (*services*) terhadap kelompok minoritas. Dengan kebijakan ini, seorang Muslim diharapkan –termasuk etnik agama lainnya bisa saja menjadi “*a real Australian*”, dan tidak harus menjadi “*a typical Australian*”. Pelayanan itu berbentuk kebijakan pendidikan multikultural sejak tingkat pendidikan dasar sampai menengah, kesehatan, pemukiman, subsidi, pendidikan/pengajaran *multi-lingual*, hukum, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bagi kelompok Muslim, ideologi ini merupakan ‘pintu gerbang’ untuk memperkenalkan pemahaman dan pengertian Islam yang sesungguhnya kepada khalayak masyarakat kulit putih yang selama ini ‘*ignorance*’ dan ‘*intolerance*’ terhadap Islam.

Secara internal, ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat Muslim Australia di dalam merespons kebijakan tersebut, antara lain kurangnya kemampuan bahasa Inggris, kurangnya keahlian (*skill*), fragmentasi kelompok agama yang terpusat pada latar belakang etnis, dan dangkalnya interpretasi terhadap ajaran Islam, dikarenakan latar belakang negara asal. Diperlukan pemahaman baru bagi masyarakat Muslim Australia dalam menafsirkan ajaran-ajaran pokok Islam yang bersifat *universalism transcendental* atau *universalism trans-culturalism* sehingga bisa hidup berdampingan dengan *multikulturalisme* di negara-negara Barat. Mengutip pendapat Prof. Dr. Taufik Abdullah dalam seminar *Islam and the West*, 11-12 September 2002, menegaskan bahwa *multikulturalisme* merupakan alternatif untuk memecahkan masalah “*clash of civilization*” antara Islam dan Barat. Dengan kata lain, perpaduan *universalism transcendental* dengan *multiculturalism* bisa menghindarkan konflik antara “*religious culture* dan *secular culture*”. Setidaknya umat Islam Australia tidak perlu mengkhawatirkan generasi ketiganya akan mengalami kehilangan keyakinan Islam mereka.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa respons pemerintah dan masyarakat Australia terhadap *multikulturalisme* telah mempengaruhi *way of life* mereka sehingga membentuk masyarakat baru yang toleran dan menghargai khazanah budaya berbagai lapisan masyarakat. Seperti terlihat di dalam keberadaan komunitas Islam Australia yang mendapatkan ruang bagi proses pengembangan komunitas itu sendiri. Implikasi *multikulturalisme* secara demonstratif telah memunculkan kesetaraan sosial tanpa

mengenal latar belakang sosial, budaya, etnik, dan agama sebagai bagian cita-cita nilai demokrasi yang bersifat universal.

Catatan Kaki

1. Eliezer Ben-Rafael, "Multiculturalism in Sociological Perspective", in Rainer Baubock (ed.), *The Challenge of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration*, Avebury, England, 143.
2. Joseph H. Careens dan Melissa S. Williams, "Muslim Minorities in Liberal Democracies: The Politics of Misrecognition", in Rainer Baubock (ed.), *the Challenge of Diversity*, 157.
3. Jean I. Martin, *The Migrant Presence: Australian Responses 1947-1977*, Sydney: George Allen & Unwin, 1978, 15-25.
4. James Jupp (ed.), James Jupp, "Power in Ethnic Australia", in James Jupp (ed.), *Ethnic Politics in Australia*, Sydney: George Allen & Unwin, 1984, 184-185.
5. Norman C. Habel, "Introduction", in Norman C. Habel (ed.), *Religion and Multiculturalism in Australia*, Adelaide: Australian Association for the Study of Religion (AASR), 1992, 12.
6. The Australian Council on Population and Ethnic Affairs, *Multiculturalism for All Australians: Our Developing Nationhood, Commonwealth of Australia*, Canberra, 1982, 12.
7. The Australian Council on Population and Ethnic Affairs, *Multiculturalism for All Australian*, 12.
8. Bilal Cleland, *the Muslims in Australia: A Brief History*, unpublished paper, 2000, Melbourne; Lihat juga Abdullah Saeed, *Islam in Australia*, Sydney: George Allen & Unwin, 2002, 7.
9. Mary Lucille Jones (ed.), "The Years of Decline: Australian Muslims 1900-40", in Jones M. Lucille, *an Australian Pilgrimage: Muslims in Australia from the 17 Century to the Present*, Melbourne: the Law Printer, 1993, 77.
10. Gary D. Bouma, *Mosques and Muslim Settlement in Australia*, Canberra: Australian Government Printing Service, 1994, 27.
11. Anthony H. Jones dan Abdullah Saeed, "Muslims in Australia: The Building of a Community", in Yvonne Y. Haddad dan Jane I. Smith (ed.) *Muslim Minorities in the West*, 201.
12. Anthony H. Jones dan Abdullah Saeed, "Muslims in Australia: The Building of a Community", in Yvonne Y. Haddad dan Jane I. Smith (ed.) *Muslim Minorities in the West*, 204.
13. Khalida Begum, *Islam and Multiculturalism: With Reference to Muslims in Victoria*, Unpublished Dissertation, Monash University, Melbourne, 1984, 119.

Daftar Pustaka

- Begum, Khalida. *Islam and Multiculturalism: With Reference to Muslims in Victoria*, Unpublished Dissertation, Monash University, Melbourne, 1984.
- Ben-Rafael, Eliezer. "Multiculturalism in Sociological Perspective", in Rainer Baubock (ed.), *The Challenge of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration*, Avebury, England.
- Bouma, Gary D. *Mosques and Muslim Settlement in Australia*, Canberra: Australian Government Printing Service, 1994.
- Carens, Joseph H. and Williams, Melissa S. "Muslim Minorities in Liberal Democracies: The Politics of Misrecognition", in Rainer Baubock (ed.), *the Challenge of Diversity*.
- Cleland, Bilal. *the Muslims in Australia: A Brief History*, unpublished paper, 2000, Melbourne.
- Habel, Norman C. "Introduction", in Norman C. Habel (ed.), *Religion and Multiculturalism in Australia*, Adelaide: Australian Association for the Study of Religion (AASR), 1992.
- Jones, Anthony H. and Saeed, Abdullah. "Muslims in Australia: The Building of a Community", in Yvonne Y. Haddad dan Jane I. Smith (ed.) *Muslim Minorities in the West*.
- Jones, Mary Lucille (ed.), "The Years of Decline: Australian Muslims 1900-40", in Jones M. Lucille, *an Australian Pilgrimage: Muslims in Australia from the 17 Century to the Present*, Melbourne: the Law Printer, 1993.
- Jupp, James (ed.), "Power in Ethnic Australia", in James Jupp (ed.), *Ethnic Politics in Australia*, Sydney: George Allen & Unwin, 1984.
- Martin, Jean I. *The Migrant Presence: Australian Responses 1947-1977*, Sydney: George Allen & Unwin, 1978.
- Saeed, Abdullah. *Islam in Australia*, Sydney: George Allen & Unwin, 2002.
- The Australian Council on Population and Ethnic Affairs, *Multiculturalism for All Australians: Our Developing Nationhood, Commonwealth of Australia*, Canberra, 1982.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004